

## KEJAKSAAN AGUNG SELIDIKI PENGADAAN BENIH JAGUNG RP 170 MILIAR DI NTB



<https://www.google.com/search>

MATARAM-Kejaksaan Agung<sup>1</sup> (Kejagung) menyelidiki pengadaan benih<sup>2</sup> jagung tahun 2017 di NTB. Sejauh ini, permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait sudah dilakukan. Diantaranya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB Husnul Fauzi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hal ini dibenarkan Kapuspenkum Kejagung Mukri. Ia mengatakan, penanganan kasus tersebut sudah sampai ke tahap penyelidikan. Tim masih mengumpulkan keterangan dari pihak terkait. “Iya, sekarang sedang diselidiki,” katanya membenarkan ketika dihubungi melalui ponsel. Ia belum mau menjelaskan detail perkembangan penanganan kasus tersebut. Karena kasus itu sedang dalam proses penyelidikan.

Pada tahun 2017, NTB mendapat anggaran untuk program upaya khusus padi, Jagung dan Kedelai (Upsus) dari Kementerian Pertanian sekitar Rp 285 miliar. Sementara khusus jagung, informasinya anggaran yang dihabiskan sekitar Rp 170 miliar.

Dalam pengadaan<sup>3</sup> benih jagung itu, di lapangan benih yang diterima para petani diduga berkualitas buruk. Bahkan ditemukan juga benih diduga palsu dan berjamur.

Khusus di Dompu, sekitar 537 kelompok<sup>4</sup> tani yang menerima bantuan benih jagung. Yaitu di Kecamatan Dompu, Pajo, Kempo dan Pekat. Total bantuan 5,7 ton dari 20 ton untuk Kabupaten Dompu. Tetapi jenis bibit seperti Bisi 18, jenis DK dan jenis bima uri 20 itu diduga oplosan. Temuan yang sama ada di Bima. Bibit yang diterima petani tidak sesuai dengan usulan. Petani mengusulkan misalnya bisi 18, tapi yang disalurkan benih merek lain. (dae)

### Sumber Berita

1. <https://katada.id/kejaksaan-agung-selidiki-pengadaan-benih-jagung-rp-170-miliar-di-ntb/1/10/2019>

2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/279419/Giliran.Kadistan.se.Pulau.Sumbawa.Diperiksa/31/10/2019>
3. <https://news.gatra.com/detail/news/453733/hukum/kasus-190-ton-bibit-jagung-palsu-ditntb-ditangani-kejagung/30/10/2019>

### **Catatan**

Pengadaan bibit jagung ini adalah merupakan program khusus kementerian pertanian program upaya khusus padi, Jagung dan Kedelai dengan pagu anggaran 285 Milyar. Dari total anggaran tersebut senilai Rp 170 Milyar khusus untuk pengadaan bibit jagung. Anggaran tersebut dianggarkan oleh kementiran pertanian yang kemudian ditransfer ke pada pemerintah daerah provinsi NTB. KPA atas penggunaan tersebut adalah kepala dinas pertanian dan perkebunan. Berdasarkan ketentuan kegiatan pengadaan bibit jangung tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadan barang/jasa pemerintah yakni, Perpres nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan-ketentuan lainnya termasuk keputusan menteri pertanian dan perkebunan terkait jenis dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diadakan.

Atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit jagung tersebut, masih dalam tahap penyidikan APH, artinya masih dalam tahap Pulbaket, proses penyelidikan akan menjadi penyidikan tergantung ada tidak barang bukti dari hasil penyelidikan untuk dilakukan penetapan tersangka. Tahapan-tahap proses tersebut merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

### **End Note/Catatan Akhir**

---

<sup>1</sup> Kejaksaan Agung Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide: ps1 2 UU 16/2004]

<sup>2</sup> **Benih** adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan yang akan dijadikan [vide: <https://www.kbbi.web.id/benih>]

<sup>3</sup> **pengadaan**/peng-a-da-an/ n proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dan sebagainya [vide: <https://www.kbbi.web.id/ada>]

<sup>4</sup> kelompok/ke-lom-pok/ n 1 kumpulan (tentang orang, binatang, dan sebagainya); 2 golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan sebagainya); 3 gugusan (tentang bintang, pulau, dan sebagainya); 4 Antr kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu[ vide: <https://www.kbbi.web.id/kelompok>]